

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintah di daerah. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya setelah habis masa jabatan sebelumnya. Tugas dan wewenang Kepala daerah adalah memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu yang berjalan di daerah.

Didalam Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Presidensial dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik. Agar keputusan publik di dukung oleh masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik maka:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat.
2. Perumusan kebijakan publik disusun secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat.
3. Memiliki akuntabilitas publik yang jelas.

4. Adanya pengawasan dari Masyarakat dan Lembaga perwakilan rakyat ([Http://Kemendagri.go.id](http://Kemendagri.go.id) diakses 26 April, 07.00).

Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek structural dari suatu Negara sesuai dengan pandangan bahwa Negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintah daerah dapat mempelancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Di Indonesia pelaksanaan pemerintah daerah merupakan bentuk realisasi dari amanat yang tertuang dalam salah satu pasal UUD 1945, yaitu pasal 18. Dalam perjalanan Undang-undang otonomi daerah sampai pada saat di berlakukannya Undang-undang otonomi daerah yang terakhir, yakni undang-undang nomor 32 tahun 2004, ada perubahan yang sangat signifikan yakni dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Erdiansyah, 2013).

Menurut (Lutfi, 2014:149) Pemilihan kepala daerah langsung merupakan suatu tahap pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi solusi elegan dan sekaligus trobosan untuk mengatasi kemacetan demokrasi lokal. Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemberdayaan demokrasi di tingkat lokal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ini adalah:

- a. Pemilihan Kepala Daerah langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi ditingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik.
- b. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan mampu membangun serta mewujudkan *local accountability*. Ketika seorang kandidat terpilih menjadi kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), maka para wali rakyat yang mendapat meningkatkan kualitas akuntabilitasnya
- c. Terciptanya optimalisasi mekanisme *check balances* antara lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan demokrasi pada level lokal.
- d. Pemilihan Kepala Daerah langsung diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kesadaran politik dan kualitas partisipasi masyarakat.

Aktor utama sistem pemilihan kepala daerah adalah rakyat, Partai politik dan Calon kepala daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Kegiatan tersebut antara lain: Pendaftaran pemilih, penempatan calon, kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara serta penetapan calon terpilih.

Dapat digaris bawahi Kepala Daerah ialah yang memegang kekuasaan di suatu daerah yang ia pimpin dan dipilih langsung oleh masyarakat daerah tersebut. Disinilah sistem demokrasi yang memiliki suatu aturan yang mengatur ketatanan dari pusat ke daerah supaya tidak hanya dipusat yang

selalu didominasi dalam hal Perekonomian tetapi daerah diberi ruang untuk mengatur perekonomiannya sendiri, maka dari itu pemerintah pusat membentuk Otonomi daerah supaya Kepala Daerah bisa mengelolah perekonomiannya. Kepala daerah juga memiliki peran penting dalam menyuarakan suara masyarakat, baik dalam hal keadilan, maupun dalam hal kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Kepala daerah sendiri ditunjuk melalui partai politik atau menggunakan koalisi partai untuk menetapkan calon kepala daerah itu sendiri. Partai politik merekrut calon-calon kepala daerah langsung dengan memilih masyarakat yang berkompeten dalam hal berkepemimpinan, tegas, jujur, dan adil.

B. Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Rekrutmen ialah serangkaian proses mencari, menemukan, mengajak juga atau menetapkan sejumlah orang atau individu, baik dari dalam maupun luar sebagai calon kandidat dengan spesifikasi atau karakteristik khusus yang dibutuhkan. Dalam pengertian rekrutmen ialah suatu proses dalam memilih seseorang yang handal dalam segala hal untuk memimpin dalam suatu pemerintahan yang akan ia peroleh. Adapun Rekrutmen politik yang lebih memperhatikan sudut pandang fungsionalnya yaitu *“the process by which citizens are selected for involvement in politics”*. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah *“proses melibatkan warga negara dalam politik”*. Proses rekrutmen politik pada umumnya diberbagai negara dapat melalui partisipan yaitu merupakan pendukung yang kuat dan loyal terhadap

partai, *compartmentalization* yaitu rekrutmen berdasarkan latar belakang pendidikan, *immediate survival* yaitu rekrutmen ditentukan oleh elit partai tanpa memperhitungkan kemampuan orang yang direkrutmen, dan *civil service reform* yaitu rekrutmen karena atas dasar pelayanan (Ardiansyah, 2017:149).

Salah satu fungsi Partai Politik dalam sistem politik demokrasi adalah fungsi rekrutmen politik (Norris,2006:89), fungsi ini merupakan fungsi khas partai politik. Bagi partai politik, calon yang didominasi memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan public bahwa rekrutmen politik menunjukkan tipologi partai. Salah satu tahapan penting pemilu adalah pencalonan. Menurut Subakti (Subakti, 1992) yang dimaksud dengan pencalonan adalah tata cara yang ditempuh peserta pemilu dalam mengajukan calon, yang meliputi siapa yang melakukan pencalonan, bagaimana cara melakukan pencalonan, bagaimana cara menyusun daftar calon, dan apa persyaratan seorang calon.

System perekrutmenan politik tentu saja memiliki keberagaman yang tiada terbatas, walaupun dua cara khusus yakni, seleksi pemilihan melalui ujian serta latihan dapat dianggap sebagai yang paling penting. Kedua cara ini, tentu saja juga memiliki banyak sekali keberagaman dan banyak diantaranya mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik (Rush, 2013;185).

Adapun yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses oleh partai politik dalam mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik

tidak sebatas hanya untuk mencari anggota baru, tetapi juga merekrut dan mencalonkan anggota partai untuk posisi jabatan publik. Rekrutmen politik juga dimaknai luas, sebagai cara pemilihan, seleksi, dan pengangkatan para warga negara guna untuk di orbitkan menjadi calon-calon pemimpin dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya (Fitriyah, 2020:3).

Menurut Czudnochowski rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Bisa diartikan bahwa rekrutmen politik tidak hanya memilih seorang warga negara untuk dicalonkan menjadi Kepala daerah ataupun Legislatif tetapi warga negara yang telah masuk didalam sebuah partai harus lah aktif untuk membantu partai meningkatkan akuntabilitas partai ditengah-tengah masyarakat.

Czudnochowski juga memberikan dua model yang digunakan partai politik dalam perekrutmen diantaranya :

a. Rekrutmen Terbuka

Rekrutmen terbuka memiliki syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh politik dapat di ketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memelihara dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

b. Rekrutmen Tertutup

Rekrutmen tertutup berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka, dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasi (Ropik dkk, 2018:276).

Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, Rekrutmen politik dapat berorientasi pada koalisi partai politik, penentuan siapa yang layak diusung bisa berdasarkan inisiatif partai politik tertentu, namun juga dapat melalui suatu jaringan koalisi. Partai-partai yang masuk dalam tantangan koalisi, tentu memiliki kesamaan dalam menentukan calon. Rekrutmen pasangan yang layak diusung juga dapat ditentukan melalui jumlah kursi di parlemen, partai yang memiliki jumlah kursi yang banyak akan menjadi penentu utama dalam penentuan arah kebijakan (Ardiansyah, 2017).

Menurut (Hazan dan Rahat, 2006: 110-114) menyebutkan empat hal penting dalam rekrutmen politik dalam pemilihan kepala daerah, yakni :

1. Siapa yang dapat dinominasikan sebagai calon

Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan diluar yang ditentukan oleh Negara. Regulasi Negara biasanya meletakkan

persyaratan-persyaratan dasar bagi individu yang boleh menominasikan diri, diantaranya adalah persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batasan deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.

2. Siapa yang melakukan seleksi calon

Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Penyeleksian dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eksklusifitas.

3. Dimana calon diseleksi

Menyebutkan sebagai persoalan desentralisasi. Secara ringkas ia menyatakan bahwa ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi territorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik.

4. Bagaimana calon diputuskan

Ia menyebutkan dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan. Dalam system pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksian dapat mengubah daftar

komposisi. Sementara itu dalam system penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

Sedangkan Menurut (Harris, 2005.19), rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting :

1. Penjaringan calon, dimana tahapan ini mencakup interaksi antara elit partai ditingkat local atau ranting partai dengan elit partai ditingkat atasannya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elit tingkat cabang daerah.
3. Pentetapan calon. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon.

Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik disesuaikan dengan *platform* dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Akibatnya, derajat demokrasi partai politik turut menentukan kualitas calon kandidat.

Berbeda dari pemilu legislatife dan pilpres yang membatasi pencalonan hanya oleh partai politik, untuk Pemilihan Kepala Dearah dibuka dua jalur dalam pencalonan sesuai dengan aturan pasal 40,UU Nomor 10 tahun 2016 diantaranya:

- a. Melalui pengusulan oleh partai politik/gabungan partai politik (koalisi) yang memiliki kursi di DPRD dan memenuhi ambang batas pencalonan (20% kursi DPRD atau 25% suara sah di daerah pemilihan yang bersangkutan).
- b. Melalui jalur perseorangan (Independen) yang dilakukan oleh sejumlah pemilih, disini hanya mengajukan diri untuk maju dalam kontes pemilihan kepala daerah tanpa di usung oleh partai politik (Fitriyah, 2020).

Dalam undang-undang Pemilihan kepala daerah mengamatkan kepada setiap partai politik untuk melakukan rekrutmen calon kepala daerah secara terbuka dan demokratis dalam setiap tahapan pencalonannya, yang dimulai dari penjaringan, seleksi kandidat dan penetapan kandidat (Witianti dan hendra, 2015:9). Proses rekrutmen yang terbuka dan demokratis tersebut tidak dijelaskan secara rinci sehingga ditafsirkan sesuai dengan kepentingan masing-masing partai politik. Kacung Marijan menyebutkan bahwa, dalam sistem demokratis, suatu pengambilan keputusan dapat berpotensi konflik, sehingga terkadang untuk menghindari konflik tersebut partai politik lebih bersifat sentralistik.

C. Proses-proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Proses rekrutmen calon kepala daerah memiliki tiga proses untuk maju sebagai calon kepala daerah yang di usung oleh partai politik, meliputi:

- a. Proses Sertifikasi

Proses ini merupakan pendefinisian kriteria siapa yang dapat masuk dalam pencalonan yang meliputi aturan-aturan pemilu, aturan-aturan partai, dan norma-norma partai.

b. Proses Penyeleksian

Proses ini merupakan mencakup persediaan (*supply*) calon yang memenuhi syarat pemerintah (*demand*) dari penyeleksian saat memutuskan siapa yang dinominasikan.

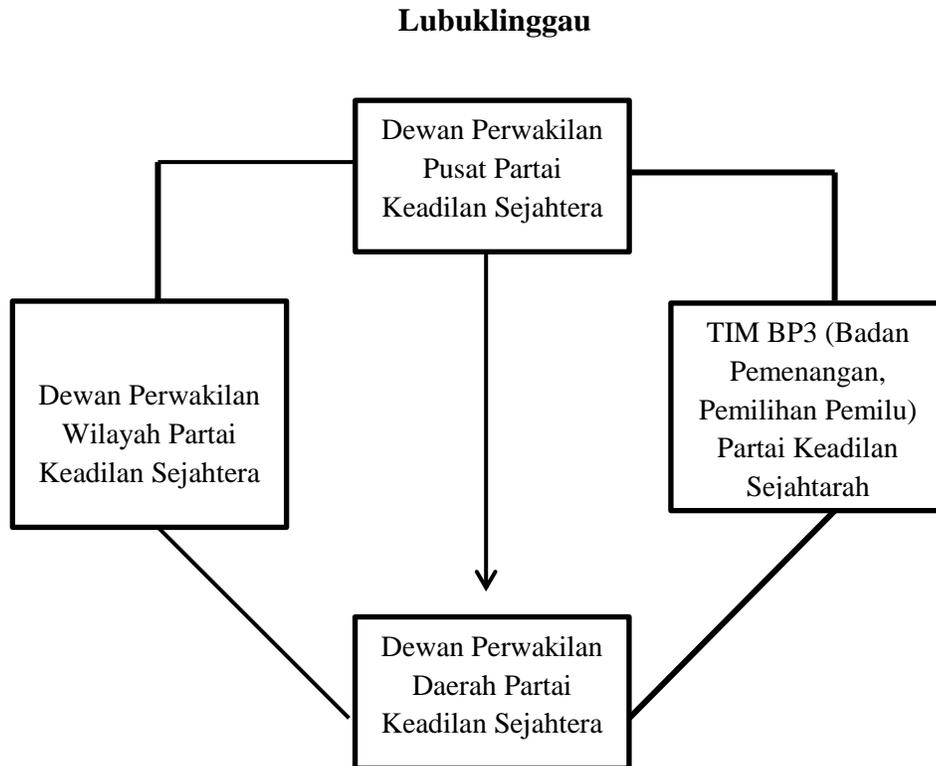
c. Proses Pemilu

Proses ini merupakan tahap yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Proses pertama dan kedua dari proses rekrutmen politik adalah domain penuh partai politik. Menurut Subakti yang dimaksud dengan pencalonan adalah tata cara yang ditempuh peserta pemilu dalam mengajukan calon, yang meliputi siapa yang melakukan pencalonan (Fitriyah,2020:3).

Rekrutmen Politik juga tidak hanya mengenai suatu pencalonan dari partai politik saja, tetapi rekrutmen berdasarkan kemampuan kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutmen seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu dikaji dan di pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Masyarakat yang ingin mencalonkan harus lah memiliki skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedunia politik. Karena dunia

politik sendiri merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik.

Bagan 1. Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPD PKS Kota



D. PARTAI POLITIK

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan

organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi Negara. Dan ia baru ada di Negara modern.

Beberapa tokoh sejarah yang berjasa dalam melopori politik yakni, M. Ostrogorsky (1902), Robert Michels (1911) Maurice Dauverger (1951), dan Sigmund Neumann (1956). Setelah itu sarjana behavioralis, seperti Joseph Lapalomba dan Myron Weiner, secara khusus meneropong masalah partai dalam hubungannya dengan pembangunan politik yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul "*Political Parties and Political Development*" (Lapalomba dan Weiner, 1996).

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik

dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 1998:404).

Dalam makna luas Partai politik merupakan elemen terpenting dalam sebuah proses demokrasi. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut dalam pemilihan umum. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai Politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (*link*) antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.

Pengertian Partai Politik (Labola dan teguh, 2015) dari sisi etimologis Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin Pars, yang berarti "*bagian*". Dengan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu partai.

Secara etimologis kata politik (Budiardjo,1998:405) berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota ataupun komunitas secara keseluruhan. Hal ini berarti politik ialah segala usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. Politik itu sendiri yang merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara.

Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai politik menurut para ahli :

1. Andrew Heymood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemaenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya.
2. Roger F. Soltau, Politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan-tujuan Negara, dan lembaga-lembaga Negara yang berhubungan langsung dengan warga negaranya dan Negara lain.
3. Ramlan Surbakti, politik adalah proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.(Tokan Pureklon 2020;67)

Partai politik juga bisa disebut bagian dari infrasturuktur politik dalam Negara. Untuk memahaminya maka beberapa ahli menyatakan pendapat tentang pengertian partai politik dalam Negara. Untuk memahaminya maka para ahli menyatakan pendapat sebagai berikut.

- a. Miriam budiarjo, menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama.
- b. Sigmud Neuman, dalam modern polical parties mengemukakan definisi sebagai berikut, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar suatu persaingan dengan golongan

atau kelompok-kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Dapat disimpulkan oleh penulis Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan Umum, Partai Politik juga merupakan salah satu komponen infrastruktur politik, dimana partai politik sebagai perantara yang menghubungkan aspirasi-aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

Di negara Demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.

Fungsi rekrutmen yang dimiliki partai-partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk sekaligus sebagai faktor pendorong (*driven factor*) bagi praktek demokrasi yang baik pada suatu negara. Rekrutmen berkaitan dengan sejauh mana partai politik melakukan seleksi, mencari kandidat, dan menyiapkan kader-kader politik untuk memimpin negara dan pemerintah yang bersih, anti korupsi, berintegritas, akuntabel, dan dipercaya.

Fungsi rekrutmen ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi

partai politik. Schattschneider dan Norris menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini, maka ia berhenti menjadi partai politik (Katz dan Cortt, 2006).

Fungsi partai politik dinegara Demokrasi. Ada empat fungsi partai politik diantaranya:

a) Sebagai sarana Komunikasi Politik

Di sisi lain partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan dipihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara dalam suatu bursa ide-ide. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara” (Budiardjo, 1998:405).

b) Sebagai sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap

fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideology, hak, dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa (Budiardjo, 1998:407).

Didalam sarana sosialisasi politik ini, sosiologi politik menurut Morris Rosenberg dalam buku Michael Rush berpendapat jika ada tiga alasan pokok orang bersikap tidak percaya terhadap politik. diantaranya yaitu:

1. Karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivis politik. Orang beranggapan jika aktivitas politik merupakan ancaman untuk kehidupannya.
2. Karena anggapan orang-orang jika berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan hal yang sia-sia. Berpartisipasi atau tidaknya mereka dalam politik tidak memiliki dampak pada proses politik.
3. Tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bahkan politik bukan hal yang harus ditekuni sehingga mengalahkan hal lain untuk dilakukannya (Michael Rush dkk, 2013;143)

Pelaksanaan fungsi sosialisasi seperti ini lah yang harus dilakukan dalam peran sosiologi politik dengan melakukan berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus, kader, penataran, dan sebagainya untuk mensosialisasikan apa itu partai politik terhadap masyarakat sehingga apabila di sosialisasikan masyarakat tidak merasa takut dan merasa peduli dalam kontak dengan partai politik. Disini penulis mengambil kesimpulan bahwa sangatlah penting bagi partai untuk mensosialisasikan Partai mereka kepada masyarakat dikarenakan bila partai tidak pernah mensosialisasikan partainya kepada masyarakat, masyarakat itu sendiripun tidak tau bagaimana program-program kerja mereka nanti untuk rakyat, maka dari itu sosialisasi politik sangat lah penting untuk semua partai supaya bisa dikenal dikalangan masyarakat luas.

Kemudian dalam Marketing Politik menyediakan perangkat teknik dan metode marketing dalam dunia politik. Menurut (Firmanzah, 2012;194) dalam Scammell menyebutkan bahwa kontribusi marketing dalam dunia politik terletak pada strategi untuk dapat memahami dan menganalisis apa yang diinginkan dan dibutuhkan dalam pemilih. Aktivitas politik harus sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Mungkin sudah saatnya kita menyakini sudah berakhirnya mekanisme politik yang mencanangkan isu serta pesan politik secara *top-down* dari elit politik ke masyarakat. Masyarakat dewasa ini, seiring dengan berkembangnya

masyarakat madani (*civil society*), adalah masyarakat yang semakin sadar akan hak dan kewajiban politik mereka.

Marketing politik harus dilihat secara Komprehensif antara lain :

1. Marketing politik lebih dari pada sekedar komunikasi politik.
2. Marketing politik di aplikasikan dalam seluruh proses organisasi partai politik. Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi juga sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan symbol, image, platform dan program yang ditawarkan. (Firmanzah, 2012;198)

Dari kedua point tersebut bahwasanya Partai Politik tidak perlu lagi menggunakan cara yang bersifat stagnan atau hanya melakukan kampanye-kampanye dalam memilih atau memperkenalkan calon pemimpin yang akan mereka kenalkan terhadap masyarakat.

Dalam arti penting produk politik tidak hanya ditentukan karakteristik produk itu sendiri. Pemahaman pemilih juga memainkan peranan penting dalam memaknai dan menginterpretasikan sebuah produk politik. Produk politik ada tiga kategori, pertama *platform* partai, kedua catatan tentang hal-hal yang dilakukan dimasa lampau, dan ketiga ciri pribadi. Produk utama dari sebuah institusi politik adalah *platform* partai yang berisikan konsep, identitas ideology dan program kerja sebuah institusi politik. Selain itu, apa saja yang dilakukan partai politik dimasa lalu berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Akhirnya karaktersistik atau ciri seorang pemimpin atau

kandidat memberikan citra, symbol, dan kredibilitas sebuah produk politik. (Firmanzah, 2012;200).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan partai sebagai penyedia jasa yang ingin mempromosikan suatu pilihan kepada pemilih untuk memilih calon pemimpin yang memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga masyarakat dapat melihat produk-produk yang ditawarkan oleh partai politik itu sendiri.

Marketing politik tidak lepas dari perilaku politik dalam pemilihan calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat, perilaku politik pada dasarnya adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Secara umum perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik.

Perilaku politik juga termasuk kegiatan masyarakat dalam proses meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, serta mengembangkan kekuasaan. Oleh karena itu perilaku politik dibagi menjadi dua, yakni di satu pihak perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah, dan dilain pihak perilaku politik warga Negara biasa. Perilaku politik juga tindakan yang dilakukan oleh suatu subjek, berupa pemerintah dan juga masyarakat.

Ada dua perilaku politik warga Negara pada umumnya, yaitu:

1. Perasaan puas atau tidak puas dengan kenyataan yang ada.
2. Perilaku yang menginginkan atau menolak perubahan.

Orang yang sudah puas umumnya memiliki sikap perilaku politik yang positif terhadap pemerintah, sedangkan orang yang tidak puas memiliki sikap politik yang negative terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah (Tokan pureklolon, 2020;26-29)

Dapat disimpulkan dalam perilaku politik ini hendaknya partai politik melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap masyarakat, karena di setiap kelompok masyarakat pasti mempunyai pro dan kontra dalam memilih suatu pemimpin atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang tidak memperhatikan masyarakat.

Sebelum memilih pemimpin untuk dicalonkan dalam pemerintahan partai politik sangat berperan untuk melakukan pendekatan, komunikasi, sosialisasi, dan mempromosikan pemimipin yang akan mereka majukan dalam pemilihan umum. Disinilah partai politik memberikan kepada masyarakat bahwa pemimpin yang mereka pilih memiliki visi/misi, program, dan tujuan yang jelas untuk memimpin dalam suatu pemerintahan.

c) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader

yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

d) Sebagai sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada disetiap masyarakat, apalagi masyarakat yang bersifat heterogen, dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi dinegara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi didalam Negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik (Budiardjo, 1998:408-409).

Menurut (Ramlan Surbakti, 1992), mengatakan bahwa fungsi utama parati politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna

mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Dengan adanya jaminan kebebasan setiap orang seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 membuat banyaknya partai politik yang muncul di Indonesia.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntunan yang beragam dan berkembang diberbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikuti sertakan dalam Kontes pemilihan waki-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di Negara Demokrasi (Budiardjo, 1998:406-410).

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Rekrutmen Politik

1. Faktor pendukung

Dalam perekrutmenan partai politik ada beberapa factor yang menjadi pendukung dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh suatu Partai Politik untuk mencalonkan kepala daerah untuk menarik simpatisan oleh masyarakat. Hal ini sangat lah harus dilakukan oleh partai politik dengan adanya factor pendukung elektalibitas calon kepala daerah

akan dilihat terlebih dahulu elektalibitasnya, adapun factor-fator pendukung tersebut diantara lain:

- a. *Social background* : Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan, dari keluarga yang mempunyai kemampuan untuk maju menjadi calon Kepala Daerah (finansial), dan dari keluarga elit.
- b. *Political socialization* : Merupakan suatu proses yang menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
- c. *Initial political activity* : Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
- d. *Occupational variables* : Calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.
- e. *Motivations* : Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.
- f. *Selection* : Faktor ini menunjukkan pada mekanisme politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup (Czudnowski, M, 1975).

2. Faktor penghambat

Dalam kaitannya dengan Rekrutmen Pejabat Publik yang sedang dan akan terus-menerus berlangsung, maka sangat mendesak untuk mengubah

paradigma penilaian kualitas SDM calon aktor Publik (Pasangan Kepala Daerah) tersebut, menurut (Hasibuan dalam Selgman,1987) ada dua indikator penghambat yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen yaitu :

- a. Indikator “topeng” yaitu, (gelar akademik, jabatan publik dan kekayaan atau money politic),
- b. Indikator “kinerja” atau trade record. Caranya dengan melihat kualitas manusia secara hakiki dan lebih substantif, seperti hasil karya, prestasi di masyarakat, sikap dan perilakunya selama ini.